

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah negara kepulauan sering diletakan pada nama Indonesia berdasarkan aspek geografisnya, yang merupakan negara laut terbesar di dunia. Luas wilayah lautnya 3,1 juta km², dengan panjang garis pantai 81.000 km. di tengah laut tersebut di taburi 17.508 pulau besar dan kecil.¹ Jadi, laut (air) merupakan unsur utama, kemudian darat (tanah). Tetapi dalam kenyataannya, kita tidak pernah mengenal istilah “Air Tanah”, kecuali “Tanah Air”. Pemanduan dua kata (air dan tanah) tersebut menyiratkan utamanya tanah dan kemudian air.¹

Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar khususnya kekayaan laut. Namun pemanfaatan sumber daya yang dimiliki masih terbilang cukup kecil. Untuk itu, dalam meningkatkan pengelolaan dibutuhkan sebuah wadah yang beroperasi sebagai tempat pengelolaan dalam meningkatkan pemanfaatan kekayaan laut, maka dipandang perlu dibangunnya pelabuhan perikanan. Pembangunan pelabuhan sektor perikanan merupakan bagian dari mencapai pembangunan ekonomi nasional yang berbasis kelautan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

Perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan sebagai pangkalan ikan yang dilakukan diseluruh wilayah Indonesia sebagai pangkalan ikan merupakan

¹ Rokmini Dauhari dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001). Edisi Revisi. Cet. Ke-2. hlm. 1.

strategi dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan demi menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Berangkat dari hal demikian, tidak menuntut kemungkinan dapat diberlakukan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

Wilayah Kota Ternate berada pada $00^{\circ}20' - 01^{\circ}5'$ Lintang Utara dan $126^{\circ}40' - 127^{\circ}27'$ Bujur Timur dan berbatasan dengan Samudra Pasifik Sebelah Utara, Sebelah Selatan Laut Maluku, Sebelah Timur Laut Halmahera dan Sebelah Barat Laut Maluku.² Kota Ternate juga termasuk salah satu kota tertua di Indonesia, karena kota ini telah ada sebelum abad pertengahan yaitu pada abad ke-13 yang bermula dari Kesultanan Ternate.

Di samping itu, Kota Ternate menjadi konsentrasi komunitas urban dalam suatu kesatuan sosial dengan sistem atau aturan yang disebut hukum adat dan adat istiadat. Sebagaimana kota tua yang telah ada sebelum abad pertengahan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan budaya yang terus mengalami proses perkembangan dalam beberapa periodisasi serta terus mengalami perpindahan lokasi dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah pulau Ternate. Berawal dari Tobona yang terletak di puncak gunung, kemudian berpindah ke daerah sekitar lereng gunung pada wilayah benteng pertahanan yang dikenal dengan "Kota Janji" yang terletak di bagian selatan Kota Ternate saat ini.³

Kota Ternate merupakan kota yang berada di bawah kaki gunung api Gamalama, dan pernah menjadi ibu kota sementara Provinsi Maluku Utara secara *de facto* dari tahun 1999 hingga tanggal 04 Agustus 2010, Sofifi diresmikan

² Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate. *Profil Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate*. (Ternate : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate). hlm. 5-6.

³ <http://id.m.wikipedia.org/wiki> Kota Ternate-Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas. Di akses, Ternate, 28 Januari 2022, Pukul 15:00 WIT.

menjadi ibu kota Provinsi Maluku Utara menggantikan Ternate. Perkembangan Kota Ternate yang ditandai dengan kebijakan pemerintah pusat melalui penetapan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Ternate pada tanggal 27 April 1999, menyebabkan Kota Ternate mengalami peningkatan status yang awalnya Kota Administratif menjadi Kotamadya.⁴

Dengan kondisi secara geografis dikelilingi oleh laut, dengan pola kehidupan sebagai masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan, dimana kondisi ini sudah dialami oleh masyarakat secara turun temurun. Walaupun wilayah laut Ternate dikatakan memiliki potensi yang cukup kaya, namun sebelumnya angka pendapatan nelayan di wilayah pesisir Ternate bisa dikatakan di bawah rata-rata dengan jumlah hasil produksi ikan dari tahun ke tahun mengalami ketidakpastian. Hal ini disebabkan karena sebelumnya masyarakat nelayan Ternate belum mempunyai atau ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang cukup memadai baik dari segi tempat pendaratan ikan maupun tempat pelelangan ikan dan juga fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Dalam rangka untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ada, maka dipandang perlu dibangunnya pembangunan pada sejumlah pelabuhan dan pendaratan perikanan di beberapa tempat di Kota Ternate. Keberhasilan pembangunan pelabuhan dan tempat pendaratan ikan tergantung pada besarnya peran aktif pengusaha perikanan dan nelayan, baik dalam bidang pendaratan ikan untuk meramaikan tempat pelelangan ikan maupun dalam bidang penggunaan sarana dan fasilitasnya.

⁴. <http://www.a-research.ipi.edu.pdf>. *Sejarah Singkat Perkembangan Kota Ternate*. Diakses pada, 10 Mei 2020, pukul 17:24 WIT.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa Kota Ternate, merupakan salah satu pangkalan perikanan yang berada di Kota Ternate tepatnya di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara. Sebelum menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Pangkalan ini awalnya merupakan pelabuhan tradisional lokal dimana pada saat itu aktivitas yang terjadi masih bersifat umum yaitu masih terjadi aktivitas dari segi pelabuhan penyeberangan *speed boat* dan kapal kayu tradisional dari wilayah Jailolo dan Loloda.

Sedangkan aktivitas bongkar ikan yang dilakukan nelayan pada saat itu masih dilakukan di pasar Gamalama, tepatnya di samping Masjid Raya Ternate (sekarang). Setelah terjadinya kerusuhan pada tahun 1999 aktivitas pembongkaran ikan di pasar Gamalama menjadi vakum dan kemudian pada tahun 2000 aktivitas pembongkaran ikan oleh nelayan dialihkan ke Pelabuhan Dufa-Dufa. Maka, mulai tahun 2000 di dalam lingkungan pelabuhan Dufa-Dufa tidak hanya terjadi aktivitas sebagai pelabuhan penyeberangan tradisional lokal saja, tetapi juga sudah bercampur dengan aktivitas pembongkaran ikan sebagai hasil tangkapan nelayan.

Mengingat kondisi aktivitas nelayan yang terjadi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kelurahan Dufa-Dufa menjadi cukup ramai dan dapat menjadi salah satu pendukung pembangunan ekonomi yang berbasis perikanan, maka pada tahun 2003 Pemerintah Kota Ternate melakukan rencana pembuatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang berlokasi di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara dengan letak yang bersebelahan dengan pelabuhan penyeberangan

Dufa-Dufa - Jailolo dan rencana tersebut ditanggapi positif dan mendapat dukungan oleh masyarakat dan nelayan yang berada di pesisir Kelurahan Dufa-Dufa.⁵

Pangkalan Perikanan Ikan (PPI) Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara merupakan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, dimana tahapan pembangunannya mulai direncanakan sejak tahun 2003 dan tahapan pelaksanaan pembangunannya dimulai pada tahun 2005 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan dalam sistem pengelolaannya langsung di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, 2008).⁶

Dengan adanya Pelabuhan Pendaratan Ikan, Pemerintah Daerah Kota Ternate meningkatkan pembinaan serta mengawasi secara langsung seluruh aktivitas dibidang kelautan dan perikanan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dengan memprioritaskan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis kelangsungan sumberdaya lestari yang berkesinambungan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dalam penulisan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai syarat pada penulisan tugas akhir (skripsi) dalam proses akademik atau perkuliahan di Universitas Khairun Ternate Fakultas Ilmu Budaya dengan mengangkat judul “**Perkembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kelurahan Dufa – Dufa Kecamatan Ternate Utara 2006-2014**”.

⁵ Wawancara dengan Lukman selaku masyarakat Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara, Tanggal 10 oktober 2019, Jam 13:45 WIT.

⁶ Abdurrahum Sukur. *Analisis Tingkat Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa di Kota Ternate Maluku Utara*. (Tesis S 2. UT. Jakarta : 2011). hlm. 2. <http://www.repository.ut.ac.id/506/>. Universitas Terbuka. Diakses. Ternate, Tanggal 29 oktober 2019, jam 11.31 WIT.

1.2. Batasan Masalah

Pembatasan penulisan dalam sejarah selalu didasarkan pada batasan waktu dan tempat, dalam penulisan sejarah dikenal dengan adanya pembahasan berdasarkan waktu (temporal) dan (spasial). Hal ini dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang menjadi dasar dalam penulis agar tidak menimbulkan spekulasi perbedaan persepsi.

Selain itu, dalam melakukan suatu proses penelitian pastilah memiliki tempat penelitian sebagai dasar untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan teknik tanya jawab antara peneliti dengan informan sebagai sumber informasi. Sehingga demikian, peneliti memilih lokasi penelitian yang bertempat di Kota Ternate yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara.

Pemilihan pada Tahun 2006 sebagai pertimbangan awal pembuatan, didasarkan pertimbangan bahwa pada tahun tersebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ternate dibangun lengkap dengan berbagai sarana dasar/pokok, sarana fungsional, dan sarana penunjang, serta para pengusaha perikanan dan nelayan sudah dapat menggunakan fasilitas yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ternate, bahkan untuk pelelangan dan penimbangan ikan sudah dapat beroperasi di tempat tersebut. Sedangkan pada Tahun 2014 adalah sebagai batasan waktu akhir, karena pada tahun tersebut dilakukan pelebaran dermaga dengan harapan dapat membantu proses bongkar muat armada penangkapan ikan agar berjalan dengan baik dan efektif. Disamping itu, pada tahun 2014 juga dilakukan tahapan

sosialisasi peningkatan pada alat tangkap ikan yang ramah lingkungan guna untuk mencapai kesadaran masyarakat nelayan dalam melestrakan ekosistem laut.⁷

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ternate 2006-2014?
2. Bagaimana dampak sosial ekonomi pelayanan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa Ternate terhadap pengusaha perikanan dan nelayan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun harapan dari tujuan dan manfaat yang diperoleh dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan perkembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa Ternate 2006-2014.
2. Untuk mengetahui dampak sosial ekonomi masyarakat nelayan.

1.4. 2. Manfaat Penelitian

⁷ Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate. *Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2014*. (Ternate: 2014),. hlm. 24. Tidak di terbitkan.

Manfaat yang hendak ingin dicapai maka hasil penulisan diharapkan :

1. Terdapatnya referensi yang dapat menjelaskan proses kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara tahun 2006-2014.
2. Adanya referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan masukan yang dapat digunakan oleh para peneliti selanjutnya.

1.5 Tinjauan pustaka

Dalam penulisan hasil penelitian yang merupakan syarat guna memenuhi tugas akhir (skripsi) agar dapat dikatakan sebagai karya ilmiah, maka dalam penulisan menggunakan beberapa referensi yang terdiri dari buku-buku dan skripsi dari hasil peneliti dan penulis terdahulu. Adapun beberapa referensi yang memiliki orientasi pembahasan hampir sama seperti yang dibahas oleh peneliti dalam kesempatan ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, menurut Ahmad Fauzi, dalam bukunya dengan Judul *Kebijakan Perikanan dan Kelautan* menjelaskan bahwa sebagai sebuah infrastruktur pembangunan ekonomi, pelabuhan memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi suatu kawasan. Sejarah juga mencatat bahwa sebelum era dirgantara berkembang pesat, pelabuhan merupakan titik awal tumbuhnya suatu wilayah karena pelabuhan menjadi basis pusat ekonomi melalui perdagangan baik antara wilayah maupun negara. Pelabuhan dan jalur perdagangan laut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses panjang peradaban kuno menjadi moderen.⁸

⁸ Ahmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Walaupun terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai pemanfaatan laut melalui pelabuhan, tapi terdapat perbedaan yang sangat jelas yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana dalam penelitian yang dilakukan ini lebih fokus pada perkembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara 2006-2014. Sedangkan, penulisan Ahmad Fauzi membahas mengenai Kebijakan Perikanan dan Kelautan dengan menjadikan pelabuhan sebagai basis ekonomi pada masa kuno sampai moderen .

Kedua, menurut Lopian yang dikutip oleh Abdul Rahman Hamid dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Maritim Indonesia*, menjelaskan bahwa pelabuhan merupakan penghubung antara seberang laut dan daerah pedalaman dalam suatu interaksi, khususnya perdagangan maritim. Perkembangan pelabuhan sering diikuti kota-kota di kawasan pesisir, sehingga menambah intensitas komunikasi para saudagar di pelabuhan.⁹

Walaupun terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai pelabuhan tapi terdapat perbedaan yang sangat jelas yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana dalam penelitian yang dilakukan ini lebih fokus pada perkembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara 2006-2014, sedangkan penulisan yang dilakukan Abdul Rahman Hamid lebih membahas mengenai pelabuhan sebagai penghubung dalam perdagangan maritim.

Ketiga, selain itu skripsi Rita Nada yang berjudul *Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate 1988-2004* mengulas tentang dampak sosial-ekonomi

⁹ Abd Rahman Hamid. *Sejarah Maritim Indonesia*. (Yogyakarta : Ombak, 2013). hlm.14.

pelayanan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang berada di Kelurahan Bastiong, di mana pelayanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate terhadap para pengusaha perikanan dan nelayan merupakan salah satu operasional yang dipahami sebagai sarana dan prasana yang mendorongnya kegiatan produksi ikan dan jasa di bidang agrobisnis perikanan.¹⁰

Walaupun terdapat persamaan anatara penelitian yang dilakukan dengan penulisan yang dilakukan oleh Rita Nada, yaitu sama-sama membahas mengenai pemanfaatan pelabuhan, tapi terdapat perbedaan yang sangat jelas yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana dalam penelitian yang dilakukan ini lebih fokus pada Perkembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara 2006-2014, sedangkan Rita Nada lebih lebih fokus pada Pelabuhan Perikanan Nusantara yang terdapat di Kelurahan Bastiong 1988-2004.

Keempat, mengutip Umar Hi. Rajab dalam bukunya yang berjudul *Dari Pusat Ke Pinggiran "Perikanan Dan Perekonomian Di Keresidenan Ternate"*, menjelaskan mengenai peran penting Keresidenan Ternate sebagai salah satu wilayah utama atau inti dalam aktivitas ekonomi perikanan dan penyediaan beberapa kebutuhan komoditi perikanan yang memiliki nilai jual tinggi dan mampu menembus pasar global.¹¹

¹⁰ Rita Nada. *Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate 1988-2004*. (Skripsi S 1, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Khairun Ternate, 2010). hlm. 6.

¹¹ Umar Hi. Rajab. *Dari Pusat Ke Pinggiran "Perikanan dan Perekonomian Di Keresidenan Ternate"*. (Ternate : LEPKHAIR).

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan dengan penulisan yang dilakukan oleh Umar Hi. Rajab, yaitu sama-sama membahas mengenai pemanfaatan pelabuhan, tapi terdapat perbedaan yang sangat jelas yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana penelitian yang dilakukan lebih fokus pada Perkembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara 2006-2014. Sedangkan, penulisan yang dilakukan Umar Hi. Rajab lebih lebih fokus pada peran perikanan pada perekonomian di Keresidenan Ternate.

1.6 Kerangka konseptual

1.6.1. Wilayah Pesisir

Hingga saat ini belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun terdapat kesepakatan secara umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu: batas sejajar garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross-shore*).¹²

Rokhmin Dahuri dalam tulisannya tentang keanekaragaman hayati laut, menyebutkan wilayah pesisir dan lautan Indonesia mempunyai kegunaan dan manfaat yang sangat besar bagi hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia maupun dunia. Tingginya keanekaragaman hayati dapat merefleksikan potensi ekonomi perairan pesisir dan laut tersebut, yang artinya semakin tinggi keanekaragaman hayati yang terkandung, semakin besar potensi yang dapat dikembangkan. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang kaya dan beragam sumber

¹² Rita Nada Op. Cit. hlm. 6.

daya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber makanan utama, khususnya protein hewani, sejak berabad-abad lamanya.

Sementara itu, kekayaan hidrokarbon dan mineral lain yang terdapat wilayah ini juga telah dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional sejak awal Pelita I. Selain menyediakan berbagai sumber daya tersebut, wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai fungsi lain, seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan pemukiman dan pembuangan limbah.¹³

Dalam kaitannya dengan pembangunan sumber daya laut (pesisir dan lautan), pemerintah dan bangsa Indonesia telah membuat suatu kebijakan yang strategis dan antisipatif, yaitu dengan menjadikan matra laut sebagai sektor tersendiri dalam GBHN 1993, yang sebelumnya merupakan bagian dari sektor pembangunan. Arti strategis dan antisipatif ini disebabkan lima pokok;

Pertama, Fakta fisik bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 18.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km² atau 62% dari luas teritorialnya. Berdasarkan UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*), Indonesia diberi hak berdaulat (*sovereign right*) memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km² yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya hayati dan non hayati, penelitian dan yuridiksi mendirikan instalasi atau pulau buatan. Batas terluar dari ZEE ini adalah dari garis pangkal pada sudut rendah (*low water line*). Wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alamnya, baik sumber daya yang dapat pulih

¹³ Rokhmin Dahuri. *Keanekaragaman Hayati Laut*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2003). hlm. 145.

maupun sumber daya yang tidak dapat pulih. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut seperti terumbu karang dan padang lamun yang sangat luas dan sangat beragam. Wilayah pesisir Indonesia juga sangat kaya akan bahan tambang dan mineral. Sebagian besar sumber daya ini belum dikelola secara optimal

Kedua, Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk serta semakin menipisnya sumber daya alam didaratan, maka sumber daya kelautan menjadi tumpuan harapan bagi kesinambungan pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang.

Ketiga, Pergeseran Konsentrasi kegiatan ekonomi global dari poros Eropa-Atlantik menjadi poros Asia-Pasifik yang diikuti dengan perdagangan bebas dunia pada tahun 2020, sudah barang tentu akan menjadikan kekayaan sumber daya kelautan Indonesia, khususnya di KTI, sebagai aset nasional dengan keunggulan komparatif yang harus dimanfaatkan secara optimal.

Empat, Dalam menuju era industrialisasi, wilayah laut dan pesisir termasuk prioritas utama untuk pusat pengembangan kegiatan industri, pariwisata, agrobisnis, agroindustri, pemukiman, transportasi dan pelabuhan. Kondisi yang demikian menyebabkan banyak kota-kota di pesisir terus dikembangkan dalam menyambut ekonomi baru dan industrialisasi. Tidak heran apabila sekitar 65% penduduk Indonesia bermukim di sekitar wilayah pesisir.

Kelima, Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Undang-undang No.22 tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah), maka daerah provinsi dengan otonomi penuh, mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan, mengelola

dan melindungi wilayah pesisir dan laut untuk sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat dalam batas kewenangan daerah di wilayah laut provinsi sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai dan kewenangan daerah kabupaten sejauh sepertiga dari daerah kewenangan provinsi. Pengelolaan laut dan wilayah pesisir oleh daerah tidak terlepas dari visi dan misi secara nasional dan komitmen bangsa dalam melindungi wilayah-wilayah laut yang menjadi warisan umat manusia yang di titipkan ke pada bangsa Indonesia seperti perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut, dan sebagainya. Pendekatan pemanfaatan dan konservasi perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak mengurangi peluang generasi yang akan datang juga menikmati kehidupan yang lebih baik dari sekarang.¹⁴

1.6.2. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan (PP) sebagai pelabuhan khusus suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan. Pelabuhan perikanan adalah tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan sebagai pusat pembinaan dan peningkatan ekonomi perikanan yang dilengkapi fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya, untuk digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil ikan.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, (DKP, 2009) disebutkan bahwa pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di

¹⁴ Rokmini Dahuri. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan secara Terpadu*. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2001). hlm. 1-2.

¹⁵ Abdurrahman Sukur. *Op.Cit.* hlm. 8-9.

sekitarnya sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.¹⁶

Sebagai suatu wilayah yang luas laut lebih besar dari luas daratan, ditambah dengan kehidupan masyarakat dengan mata pencaharian sebagai nelayan, keberadaan pelabuhan sangatlah urgens. Sebagai sarana, keberadaan suatu pelabuhan merupakan poros yang memiliki peran inti bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Apapun jenis, bentuk serta status pelabuhan itu, ia sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat khususnya nelayan. Dengan keberadaannya yang didukung oleh sarana pra-sarana/fasilitas, pelabuhan sangatlah mendukung kelancaran aktivitas bongkar muat kegiatan keseharian para nelayan.

Peran pelabuhan perikanan sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan yang didasarkan pada kenyataan empiris, pelabuhan perikanan sebagai tempat berkumpulnya kapal tangkap nelayan. selain itu, keberadaan pelabuhan perikanan sangatlah menjamin keamanan kapal para nelayan dengan aktivitas pendaratan hasil tangkap, perbaikan kapal, serta alat tangkap, maupun pembongkaran atau pendaratan hasil tangkap nelayan selain sebagai tempat peristirahatan bagi para nelayan sebelum melakukan aktivitas penangkapan.

Dengan fungsi utamanya sebagai tempat pendaratan hasil tangkap masyarakat, fungsi lain sebagaimana disebutkan diatas ialah untuk memperlancar aktivitas kegiatan-kegiatan para masyarakat nelayan diantaranya untuk memenuhi kebutuhan melaut para nelayan seperti pengisian BBM, air tawar, es serta

¹⁶ <http://www.Pdf>. *Pengertian Pelabuhan dan Perikanan*. Di akses, Ternate, 17 Oktober 2019. Pukul 13:02 WIT.

perbekalan lainnya. Selain itu, fungsi belabuhan juga dapat dilihat dalam kerangka ekonomi yakni sebagai tempat pemasaran hasil tangkap para nelayan.

Mengingat karena ikan merupakan komoditi dengan sifat yang mudah rusak (busuk), olehnya itu peleabuhan dengan sarana dan prasarananya seperti ketersediaan es dan bak penampungan hasil tangkap nelayan (ikan) sangatlah penting baik bagi masyarakat nelayan agar hasil tangkapnya tidak mengalami kebusukan, serta bagi masyarakat yang notabennya sebagai pembeli atau konsumen yaitu agar komoditi ikan yang dibeli selalu dalam kondisi yang segar (tidak busuk).

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dalam sejarah lokal dengan spesifikasi sejarah sosial dan ekonomi. Maka prosedur penulisannya didasarkan pada metode sejarah sebagai suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau sehingga dapat direkonstruksi dengan tetap bersandar pada data yang diperoleh. Untuk menganalisa data maka dalam penulisan ini menggunakan metode sejarah yaitu:

Heuristik, adalah proses mengumpulkan data-data atau sumber sebanyak mungkin oleh peneliti, terkait dengan masalah yang diteliti baik berupa dokumen, buku-buku, koran dan lain sebagainya.

Kritik, sumber adalah langkah peneliti dalam menilai sumber-sumber yang telah terkumpul apakah sumber itu benar-benar asli atau tidak. Ada dua macam kritik sumber yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal adalah atau kritik dalam adalah menilai isi dari sumber-sumber yang telah terkumpul, sedangkan kritik

eksternal atau kritik luar adalah menilai fisik dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan.¹⁷

Interpretasi, adalah langkah ketiga peneliti untuk melakukan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikumpul. Adapun tujuan dari interpretasi adalah penyatuan (sintetis) atau sejumlah fakta yang di peroleh dari proses hueristik dan kritik sumber dan dengan teori disusunlah fakta itu dalam interpretasi menyeluruh.¹⁸

Historiografi, adalah langkah terakhir dimana peneliti mulai menyusun kata-kata berdasarkan sumber-sumber yang telah diperoleh, dinilai, dan ditafsirkan menjadi sebuah tulisan sejarah atau karya ilmiah. Heliuss Sjamsudin mengatakan bahwa dalam penulisan sejarah, wujud dari penulisan (Histrografi) merupakan paparan, penyajian, presentasi atau penampilan (eksposisi) yang sampai kepada pembaca dan dibaca oleh pemerhati sejarah.¹⁹

Dengan menggunakan metode diatas, peneliti diarahkan agar dapat melakukan penelitian ini secara sistematis dan terstruktur, serta harapan untuk kedepan bahwa hasil ini dapat mendekati sebuah kebenaran.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran kedepan tentang hasil penelitian atau hasil dari menganalisa suatu masalah yang dimulai dari bab I tentang pendahuluan. Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan

¹⁷ Sulasman. *Metodologi Penelitian sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi*. (Bandung : CV Pustaka Indah 2014). hlm.101-102.

¹⁸ *Idib.* hlm.111-112.

¹⁹ Sjamsudin Heliuss. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta : Ombak, 2012). hlm.185.

pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab inilah yang menjadi kerangka dasar dasar pemikiran dan kemudian menjadi pijakan bagi penulis untuk memulai penelitian tentang Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa Ternate.

Bab II Kondisi Umum, menceritakan tentang Profil Kelurahan Dufa-Dufa, baik dari kondisi geografis dan sosial ekonomi secara khusus di kecamatan Ternate Utara yang kemudian mengerucut kepada tema pembahasan sesuai dengan batasan masalah mengenai perkembangan dunia perikanan di Kecamatan Ternate Utara.

Bab III. Perkembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa Kota Ternate 2006-2014. Bab IV. Dampak Sosial-Ekonomi Pelayanan Fasilitas PPI Dufa-Dufa Ternate Terhadap Pengusaha Perikanan dan Nelayan. Dan BAB V yaitu Penutup, yang menjelaskan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari keseluruhan masalah yang dirumuskan pada bab I dan saran-saran.